

Implementasi Permenkes Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit

Siti Nurhaliza

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Febri Yuliani

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

***Abstract.** Stunting is a crucial issue for the government to be resolved as it contributes to the quality of Indonesian Human Resources (HR) in the future. In its implementation, it is necessary to deal with stunting so that the Rokan Hilir government can run all systems in its district well. However, it is known that there are still some problems in the socialization process carried out. The stunting prevention policy applied by the local government of Rokan Hilir Regency is implemented through the Rokan Hilir Regency Health Office as an element of the regional apparatus in charge of health. This study aims to see the realization process of the Rokan Hilir government to overcome the stunting problem by using qualitative research methods with data collection techniques through observation, interview, and documentation. The results of this study can be seen from George Edward namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. It seems that stunting management in Rokan Hilir Regency has run well since it has showed a very drastic decline from year to year until now.*

***Keywords:** Implementation, Health Regulation, Health Policy, Prevention, Stunting Management*

Abstrak. Stunting menjadi isu yang mendesak bagi pemerintah untuk segera diselesaikan karena berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dimasa depan. Dalam implementasi, sangat diperlukan Penanganan Stunting agar pemerintah kabupaten rokan hilir bisa berjalan dengan baik. Namun diketahui, masih ditemukan adanya masalah dalam proses pensosialisasian yang dilakukan. Kebijakan penanggulangan stunting yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir dilakukan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir sebagai unsur perangkat daerah yang membidangi kesehatan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat proses implementasi pemerintah kabupaten rokan hilir dalam penanggulangan masalah stunting. Dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dilihat dari George Edward yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, Penanganan Stunting di Kabupaten Rokan Hilir Sudah cukup baik dikarenakan mengalami penurunan yang sangat drastis dari Tahun ke tahun sampai saat ini.

Kata kunci: Implementasi, Permenkes, Penanggulangan, Stunting.

LATAR BELAKANG

Stunting yakni masalah sosial akan terjadi di masyarakat. Masalah stunting dapat menginjak mulai dari rahim lalu perdana nyata waktu bayi meningkat mengikuti umur dua tahun, bahwa mana dapat nyata mengikuti tubuh bayi bertambah kecil mulai mengikuti bayi beda seusianya. Stunting adalah kesehatan adapun diketahui kala sering maupun panjang fisik bayi cacat apabila dibandingkan melalui usianya. Stunting merupakan keadaan bahwa diketahui kurun langkai maupun panjang fisik bayi cacat apabila dilaksanakan melalui usianya. Cuma selalu, harus penting hingga bayi kecil sudah pasti stunting, padahal bayi stunting yakin nyata kecil. Balita ikut pada bagian stunting kperiode langki maupun panjang fisiknya membuktikan nilai dasar -2 umum diegresi (SD). Apalagi, andaikan kesehatn ini dirasai bayi adapun berdiam di asal umur 2 tahun dengan wajib dirawat serta cepat beserta benar.

Gizi buruk ialah suatu keadaan bahwa diketahui melalui timbangan beserta panjang fisik bayi antara diasal kebanyakan. Bahwa, akan menangkap kualitas asupan bahwa tunggal ini, penunjuk bahwa dimanfaatkan ialah daftar timbangan fisik mewajibkan panjang fisik (BB/TB). Melainkan menimbang dan panjang fisik, bingkai tangan akan bersama ikut ke pada penyelidikan klinis asupan jelek menuruti bayi. Keadaan gizi buruk pada bayi bukan bertemu selaku menekan maupun ringkas. Artinya, bayi adapun ikut ke ketika jenis gizi buruk berhenti menyambangi kehilangan beragam zat gizi pada masa periode yang kadaluwarsa.

Stunting ialah salah satu dari Proyek Prioritas Nasional yang wajib memperoleh kepedulian sarat dan wajib buru-buru dijaga oleh pemerintah untuk sampai tujuan pengurangan 14% pada tahun 2024. Makanya pada tanggal 26 Agustus 2019, Kementerian Kesehatan usai menentukan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi bagi Anak Akibat Penyakit, di dalamnya menyusun yang berhubungan dengan pemberian PKMK (Pangan Olahan Keperluan Medis Khusus) tentang bayi yang berbahaya Gagal Tumbuh, Gizi Kurang, dan Gizi Buruk oleh dokter Anak. Namun, dibutuhkan suatu bentuk adaptasi atau inovasi aktual cara pencegahan stunting. Pemerintah Rokan Hilir (Rohil) bersama organisasi Tim penggerak PKK Komitmen percepatan pencegahan serta penanganan Stunting 2021 Terintegrasi. Kegiatan selain Komitmen publik dalam percepatan penanganan,

pengecehan Stunting juga mendeklarasikan bersama supaya stunting menurun secara optimal di wilayah Rokan Hilir.

Deklarasi pernyataan dan kewajiban umum percepatan pembatahan dan penindakan Stunting terintegrasi kabupaten Rohil 2021 diantaranya : Membentuk 5 pilar strategi nasional, percepatan pengurangan stunting apabila rangka cara pada tingkah konvergensi stunting yang kombinasi. Kemudian, melakukan 8 gerakan Konvergensi dalam pencegahan dan penurunan stunting secara maksimal dan berkualitas. Selanjutnya mengatur rencana yang tanggap tentang pencegahan dan pengurangan stunting dan mengalokasikan jumlah dari beragam sumber sah manfaat membantu pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

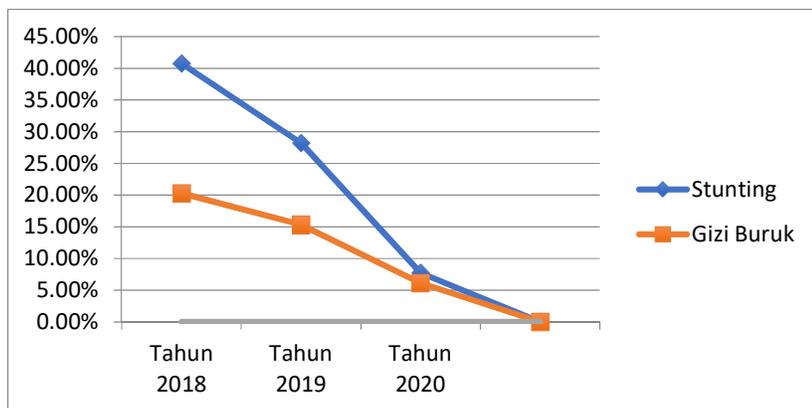
Penindakan stunting dilaksanakan melalui Intervensi Spesifik dan Sensitif. Intervensi spesifik dilakukan pada korban yaitu ibu hamil dan anak pada 1.000 hari pertama kelahiran. Sementara itu korban pada intervensi sensitif ialah masyarakat umum yang membuktikan dengan beragam pekerjaan penyusunan di luar sector kenyamanan. Makanya, kapasitas lintas sector diperlukan pada penanganan stunting.

Tabel 1 Jumlah Stunting dan Gizi Buruk dari Tahun 2018-2020 di Rokan Hilir

Tahun	Stunting	Gizi Buruk
2018	40,77 %	20,28 %
2019	28,21 %	15,31 %
2020	7,7 %	6,1 %

Sumber: Data olahan Kepemilikan Dinas Kesehatan Rokan Hilir

Berdasarkan Tabel 1 data jumlah Stunting dan Gizi Buruk dari tahun 2018-2020 di kabupaten Rokan Hilir, di jelaskan bahwa Diketahui bahwa Kasus Stunting 2018 Dirohil mencapai 40,77 %, Gizi Buruk 20,28 % Kasus Stunting pada anak. Sedangkan ditahun 2019 di rohil yaitu Stunting 28,21%, dan Gizi Buruk mencapai 15,31%. Dan pada Tahun 2020 di rohil Stunting yaitu 7,7% dan Gizi Buruk 6,1 %. Dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami penurunan yang sangat Drastis. Dan untuk Data tahun 2021 akan keluar pada tahun 2022.



Gambar 1 Grafik Jumlah Stunting dan Gizi Buruk di Kabupaten Rokan Hilir

Sumber: Data olahan Kepemilikan Dinas Kesehatan Rokan Hilir

Menurut grafik dijelaskan bahwa menunjukkan yang sudah agak menurun jumlah peningkatan Stunting di Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tidak hanya tinggal diam, seperti halnya Pemkab Rokan Hilir dan pihak dinas kesehatan terus berupaya melakukan penanganan terhadap penyakit Stunting yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

Pihak yang terlibat yaitu akan membuktikan daya guna kebijakan, kekuatan percepatan penanganan Stunting harus menetapkan anggota yang paling utama meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berumur 0-23 bulan, atau dibilang rumah tangga 1.000 HPK. Anggota itulah akan merupakan tujuan utama dari Strategi Nasional percepatan penanganan Stunting. Percepatan penurunan stunting bukan boleh dilaksanakan pada satu lembaga saja, namun mengutamakan partisipasi untuk kementerian dan lembaga lain, bahkan untuk lembaga tanpa pemerintah, meliputi dunia usaha, akademisi dan juga lembaga swadaya rakyat.

KAJIAN TEORITIS

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tori implementasi kebijakan. Menurut Budi Winarno (2002: 17) memilih kebijakan publik sebagai asumsi akan menyimpan keadaan sumber dan hasilnya yang memihak kejayaannya. Kebijakan publik itu wajib dikhususkan melalui wujud dari kebijakan yang lain contohnya kebijakan khusus. Selanjutnya, dibujuk untuk keikutsertaan variabel tidak pemerintah. Robert Eyestone seperti diambil dari Leo Agustino (2008 : 6) menjelaskan kebijakan publik andaikata “gantungan pusat anggota pemerintah melalui daerahnya”.

Berdasarkan George C. Edward dalam *impelementing public policy* (1980:11) mengutarakan ada empat faktor yang bekerja utama pada pendapatan suatu implementasi. Variable bahwa memerintah kesuksesan maupun kekecewaan implementasi kebijakan adalah: variabel communication (Komunikasi), resources (Sumber Daya), disposition (Disposisi), dan bureucratic structure (Struktur Birokrasi).

METODE PENELITIAN

Menurut ulasan ini penulis menentukan bentuk penelitian kualitatif serta pendekatan dan serta sifat analisis deskriptif (Sambuardi et al, 2020). Pada sistemnya, pendekatan kualitatif mempertemukan sebuah data yang diperoleh untuk menerangkan maupun meneruskan sebuah perbincangan (Wulan, 2020), mengemukakan data bahwa individual untuk informan bahwa berurusan melalui pembahasan akan mau diamati, selanjutnya akan menguraikan petunjuk bahwa apa ditemukan, menjelaskan serta menentukan cara induktif alias diterima lewat menguraikan sebab individual ke biasa. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Permenkes No 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit dengan Bidang Pencegahan dan Pengendalian penyakit

1. Komunikas

Edward III menjelaskan bahwa komunikasi adalah sebuah cara penguraian informasi komunikator untuk komunikasi. Pada program Penanggulangan stunting juga dilaksanakan komunikasi maupun organisasi dan penguatan kegiatan untuk menunjang ketika pengimplementasian dan mencapai keberhasilan.

Mengikuti buatan yang penjelasannya untuk sebuah informan, maka komunikasi melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir dan masyarakat dalam implementasi Penanggulangan Stunting berjalan baik dan sebagai tangkas dalam sebuah bidang implementor melakukan pelatihan dan edukasi berhubungan dengan kebijakan Implementasi Peraturan menteri kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang

Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit Studi Kasus Penanganan Stunting di Kabupaten Rokan Hilir.

Komunikasi dalam implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit Studi Kasus Penanganan Stunting di Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari komunikasi tengah pemerintah utama serta pemerintah daerah, komunikasi antara pemerintah daerah dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir, komunikasi antara perwakilan kecamatan bahwa di Kabupaten Rokan Hilir, komunikasi dengan Organisasi atau PKK, komunikasi dengan Puskesmas.

Dari hasil wawancara diatas mengemukakan bahwa Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan sosialisasi Cegah Stunting di Organisasi atau Kader Posyandu (PKK) dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya Pencegahan Stunting pada Anak kepada Kader Posyandu.

Berjalannya komunikasi juga dapat dilihat, hingga saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir sudah membuat kebijakan berbentuk peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Penurunan Kekurangan Gizi Kronis (Stunting). Disamping itu sosialisasi akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir sudah tepat sasaran melalui memberikan sosialisasi lewat media atau langsung ke Organisasi atau Kader Posyandu (PKK) sehingga mempermudah untuk menurunkan angka Stunting di Kabupaten Rokan Hilir.

2. Sumber Daya

Sumber daya ialah bagian terpenting dari implementasi kebijakan. Dalam mengimplementasikan suatu program sumber daya juga dapat menjadi factor yang dapat mempengaruhi suatu program tersebut dapat berhasil di laksanakan atau sebaliknya. Sumber daya adalah potensi yang dimiliki dan mendapatkan berbentuk fisik dan non-fisik akan diterima berupa semakin besar dan hilang, yang dapat dipergunakan sebagai penunjang suatu hal.

Dari wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir menjelaskan bahwa sumber daya dana akan tersedia juga sudah memadai dari pemerintah untuk pencegahan Stunting, bersama sumber daya fasilitas akan sangat mencukupi, dengan peningkatan penanganan warga, penyusunan dan pengusahaan prasarana dan kawasan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia kronis esensial supaya pelayanan program penanggulangan stunting di Kabupaten Rokan Hilir dapat terimplementasikan sebagaimana mestinya. Beberapa yang dikemukakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir masih kekurangan dalam segi kualitas sumber daya manusia akan melaksanakan program penanganan dan penyuluhan stunting di Kabupaten Rokan Hilir, serta sumber daya manusia dengan melaksanakan edukasi mampu penanganan akan permasalahan stunting dan keahlian sumber daya manusia tentang pengetahuan stunting masih sangat terbatas. Kabupaten Rokan Hilir sudah melakukan pemantauan dan pembinaan dan untuk peningkatan kualitas pelayanan di masyarakat, yang dilakukan dalam penanggulangan, pencegahan dan pengendalian masalah stunting.

Pelaksana Implementasi Permenkes Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit Studi Kasus Penanganan Stunting di Kabupaten Rokan Hilir memiliki sumber daya manusia yang harus diperhatikan kembali didalam bidang sosial masyarakat. Sumber daya manusia Kesos yang dimaksud dalam pencegahan stunting yakni pekerja sosial profesional, pengendalian, dan penyuluh sosial.

b. Sumber Daya Anggaran

Menurut narasumber pelaksanaan Implementasi Permenkes Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit Studi Kasus Penanganan Stunting di Kabupaten Rokan Hilir mempunyai anggaran dana akan bersul Dana Alokasi Khusus (DAK). Memperjuangkan keuangan melalui produk, ialah Dana Desa Alokasi Khusus (DAK) merupakan performa sector keadaan dan pembelajaran melalui indicator-indikator asupan, mendukung Dana Desa untuk merevitalisasi program gizi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, anggaran DAK yang dikucurkan

APBN untuk sanitasi dan air minum lokus Stunting sebesar Rp 19,8 Miliar, kemudian untuk air minum Rp 16,4 Miliar.

Berdasarkan Hasil wawancara Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikucurkan APBN anggaran untuk sanitasi dan air minum untuk menjadi titik lokus Stunting. Untuk pihak awal selanjutnya, pihaknya tengah melakukan pelaksanaan program infrastruktur di bidang sanitasi dan air minum yang berada di 21 kepenghuluan yang menjadi lokus stunting pada tahun 2021. Guna menuntaskan persoalan Stunting itu, perkim melibatkan pihak terkait seperti Bappeda, Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan program ini. Dinas Perkim ingin air minum dan sanitasi yang layak di masyarakat sehingga bisa mencegah timbulnya Stunting baru. Sehingga tidak ada lagi balita akan terkena kehabisan asupan maupun gizi buruk. Rokan Hilir bukan hanya daerah Stunting tapi seluruh daerah Rokan Hilir juga rawan air minum dan rawan sanitasi.

c. Sumber Daya Fasilitas

Berikut beberapa fasilitas yang ada di posyandu di wilayah tersebut:

Tabel 2 Data jumlah Sarana Prasarana di Posyandu

No	Sarana dan Prasarana	Vol	Satuan
1	Timbangan Injak	6,00	Buah
2	Alat Ukur Tinggi	6,00	Buah
3	Sarung Timbang	6,00	Buah
4	Papan Tikar Pertumbuhan	12,00	Buah
5	Gendongan Timbang	6,00	Buah

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dapat dijelaskan bahwa fasilitas pelayanan posyandu di setiap desa memiliki 3 atau 4 posyandu tergantung luas desa tersebut, sudah melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sudah sangat baik dan memberikan pelayanan yang bagus, akan tetapi terkendala dengan para orang

tua yang kurang memahami pentingnya posyandu untuk bayi dan orang tua enggan untuk pergi keposyandu tersebut.

3. Disposisi

Berhasil atau tidaknya implementasinya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit Penanganan Stunting di Kabupaten Rokan Hilir, sebuah factor menentukan yaitu melibatkan disposisi maupun perilaku petugas perwujudan kebijakan.

Menurut narasumber upaya Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit Penanganan Stunting pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir sudah mengupayakan agar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit dapat berhasil dengan membuat solusi yang tepat dari permasalahan Penanganan Stunting di Kabupaten Rokan Hilir yaitu dapat meningkatkan Pencegahan penyakit stunting dan juga dalam upaya Penanganan masalah penyakit Stunting oleh pihak Dinas Kesehatan mengupayakan kedepannya tidak ada lagi kendala yang terjadi sehingga Implementasinya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit di Kabupaten Rokan Hilir terutama pada Pencegahan dan Penanganan Stunting bisa berjalan dengan efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah sub variable terakhir akan menonjol kepada kemampuan implementasi kebijakan. SOP yaitu akan bentuk kinerja yang pada dasarnya personil akan melibatkan kepada penanggulangan kebijakan. *Standar operating procedure* menjadi pedoman bagi implementator dalam bertindak. Berkaitan dengan penanggulangan masalah gizi bagi anak akibat penyakit penanganan Stunting di Kabupaten Rokan Hilir, Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) adalah Pembagian tugas yang jelas dalam penanggulangan stunting pada di Kabupaten Rokan Hilir.

Dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir, tentang struktur birokrasi meningkatkan pekerjaan yang menurut SOP ialah peraturan Bupati dan Peraturan Menteri Kesehatan yang menyusun sebuah kegiatan utama dan tugas setiap bentuk di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir sehingga pada meningkatkan kegiatan dan acuannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan penanganan Stunting dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir sudah berjalan cukup baik dengan tercapainya beberapa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya pada kajian teori yaitu indikator Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Dan Struktur Birokrasi.

DAFTAR REFERENSI

- Brannen, Julia, 1999, Memadu Mertide Penelitian Kualitatif dan Kuantatif, Yogyakarta: pustaka pelajar. Moleong, Lexi J, 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Aryastami, Ni Ketut. "Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia." *Buletin Penelitian Kesehatan* 45.4 (2017): 233-240.
- Ayuningtyas, D. (2014). *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Ayuningtyas, D. (2018). *Analisis Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Aplikasi* (1st ed.). Depok: Rajawali Pers.
- Masro, A., Edison, E., & Gracediani, L. (2013). Implementasi Penanggulangan Gizi Buruk di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 8(1), 15-20.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 PENANGGULANGAN MASALAH GIZI BAGI ANAK AKIBAT PENYAKIT
- Sutraningsih, W., Marlindawani, J., & Silitonga, E. (2021). Implementasi Strategi Pelaksanaan Pencegahan Stunting di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019. *JOURNAL OF HEALTHCARE TECHNOLOGY AND MEDICINE*, 7(1), 49-67.
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kota padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 11-21.
- Prihatini, D., & Subanda, I. N. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 46-59.
- Sutraningsih, W., Marlindawani, J., & Silitonga, E. (2021). Implementasi Strategi Pelaksanaan Pencegahan Stunting di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 7(1), 49-67.
- Wulan, N. D. N. Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Permukiman Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 1(2), 84-98.
- Sambuardi, R., & Haqiqi, F. Pengaruh Pengaruh Faktor-Faktor Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(2), 110-120.